

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan Pemerintah belum matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Analisis Rasio adalah sebagai berikut:
 - a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00-10,00.
 - b. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari Rasio Keserasian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih berada dalam interval 0%-25%.
 - c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan sudah Efektif karena berada pada interval 90%-100%.

- d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikategorikan tidak efisien karena berada pada interval 100%-102%.
- e. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dari aspek pad memerlukan perhatian yang lebih dikarenakan pada tahun 2018 dan 2019 terus terjadi penurunan atau kemerosotan pertumbuhan dikarenakan PAD tahun tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sudah mampu untuk mempertahankan rasio pertumbuhan belanja. Secara teori dengan penurunan ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sudah mampu menekan pengeluaran daerah.
- f. Sebagian besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka masih diprioritaskan untuk kebutuhan Belanja Operasi sehingga Belanja Modal relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari persentase Belanja Operasi yang lebih besar dibandingkan dengan persentase Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk Belanja Operasi terutama dikarenakan besarnya Dinas-Dinas Otonomi dan Belanja Pegawai untuk gaji PNS.

6.2 Saran

- 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus lebih memperhatikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali Potensi-Potensi yang baru dan mengembangkan Potensi-Potensi yang ada

sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

- b. Pemerintah Kabupaten Malaka dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
- c. Meningkatkan Kinerja Keuangan yang lebih baik dengan memperhatikan rasio keserasian belanja modal yang masih kurang tidak mendapat perhatian.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dan yang dimiliki untuk belanja pembangunan sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasara yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan referensi ini untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel dan diharapkan untuk lebih mendalam meneliti mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio sehingga penelitiannya bisa lebih handal dan akurat dari pada peneliti yang telah dilakukan sebelumnya.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono, Jusup. 2005. *Dasar- Dasar Akuntansi*. Edisi Enam. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Barisan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, N. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.
- Epivani, Rima Villanova. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Periode 2009-2012*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Istyaningtias, Dian. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*. Yokyakarta: Dava Media.
- Mahmudi. 2010. *Manejemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YANKPN.
- Mahesa, DJ. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah*. Yokyakarta: Andi
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, DR. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung PT. Refika Aditama

Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor. 105 Tahun 2000. Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan*.

Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti, Volume 7 (13).

Rulin. “*Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara*”. 11 Februari 2014. <https://respository.Ung.ac.id>

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014. Tentang *Keuangan Negara*.